



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



KATA PENGANTAR

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya telah merealisasikan Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebanyak 4 program yang terdiri dari 11 kegiatan telah direalisasikan dengan pembiayaan dari sumber dana DAU, DOK, PAD dan DAK Non Fisik. Jumlah anggaran belanja langsung yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sebesar Rp 4.190.632.022,- (Empat Miliar dengan atribut sebutan capaian kinerja berhasil, sebagaimana data capaiannya dirangkum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

Kami sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, namun tentunya diharapkan apa yang disampaikan ini sudah cukup menggambarkan existing pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan dalam rangka merealisasikan AKIP selama tahun 2021.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah dan semua pihak yang telah memberikan dukungan terkait dengan penyusunan LAKIP ini.

Semoga Tuhan memberkati.

Wamena, Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jayawijaya



Drh. IMADE PUTRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650416 199703 1 003

IKHTISAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada pemerintah tentang kinerja pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan Negara selama satu tahun anggaran 2021, dalam rangka menilai implementasi peningkatan kinerja dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berorientasi kepada prinsip akuntabilitas, efektifitas, transparansi dan efisiensi.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya telah merealisasikan Program dan Kegiatan Percepatan Peningkatan Ketahanan Pangan, yaitu sebanyak 4 program terdiri dari 11 kegiatan prioritas dengan catatan kinerja bahwa pelaksanaan selama tahun 2021 berjalan baik dan lancar, secara umum capaian kinerja rata-rata 94,48 %, mendapatkan sebutan atribut Berhasil. Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 4.190.632.022,- dimana sumber dana dari DAU sebesar Rp 3.058.115.022,- atau 72,97 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021, DBH sebesar Rp 132.517.000,- atau 3,16 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021, OTSUS sebesar Rp 650.000.000,- atau 15,51 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan DAK Non Fisik sebesar Rp 350.000.000,- atau 8,36 % dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021

Realisasi kegiatan fisik dan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu realisasi pada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 2.762.863.118,- atau 92,42 % dari Total pagu dana yang sebesar Rp 2.989.406.022,- , PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Rp. 1.060.197.000,- atau 99,55 % dari Total pagu dana yang sebesar Rp 1.065.000.000,-, PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Rp. 67.417.175,- atau 99,85 % dari Total pagu dana yang sebesar Rp 67.517.000,- ,PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Rp. 68.676.700,- atau 99,95 % dari Total pagu dana yang sebesar Rp. 68.709.000,- dalam hal realisasi fisik maupun keuangan,

sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 seluruh kegiatan dapat dinyatakan telah selesai 100% dan keadaan kas keuangan SKPD telah Nihil.

Seluruh hasil kegiatan dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1. Tujuan LAKIP.....	2
1.1.2. Dasar Hukum.....	2
1.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi SKPD.....	4
1.2.1. Struktur Organisasi SKPD.....	4
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	6
1.2.2.1. Tugas Pokok DKP.....	6
1.2.2.2. Fungsi DKP.....	6
1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	24
1.3.1.1 Sumber Daya Manusia.....	24
1.3.1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan.....	29
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1. Rencana Strategis.....	31
2.1.1. Gambaran Singkat tentang Visi.....	31
2.1.2. Misi.....	33
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	37
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	41
2.2.1. Komitmen Kinerja DKP tahun 2021.....	42
2.2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja SKPD.....	48
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	49
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	49
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	58
BAB. IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Permasalahan.....	65
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.....	25
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.....	26
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.....	27
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021	27
Tabel 1.5.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021	29
Tabel 1.6.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan/Jenjang Eselon pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021	29
Tabel 1.7.	Jumlah Aset Menurut Jenis s/d Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021	29
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	34
Tabel 2.2.	Keselarasn Misi, Tujuan dan Sasaran DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.....	41
Tabel 2.3.	Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.....	43
Tabel 2.4	Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja DKP Kab. Jayawijaya tahun 2021.....	47
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja DKP Kab. Jayawijaya tahun 2021.....	49
Tabel 3.2.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021	52
Tabel 3.3.	Program, Kegiatan dan Indikator Pendukung Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.....	55
Tabel 3.4.	Program , Kegiatan dan Indikator Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021	57
Tabel 3.5.	Pagu Anggaran Belanja Langsung DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 per sumber dana dan realisasinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.....	59
Tabel 3.6.	Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung APBD DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan..... 5



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020
- Lampiran 2. Tabel RENSTRA DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023
- Lampiran 3. Tabel Rencana Kerja DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021
- Lampiran 4. Tabel : Indikator Kinerja Utama DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021
- Lampiran 5. Tabel : Perjanjian Penetapan Kinerja DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021
- Lampiran 6. Tabel : Pengukuran Kinerja DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.
- Lampiran 7. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
- Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Dasar rujukan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumberdaya yang dilaksanakan secara bijaksana. Hal mana pertanggung jawaban kinerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang mengamanatkan bahwa tertib penyelenggaraan Negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dengan menganut azas-azas tersebut dapat menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Negara dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu unsur penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan Negara selama satu tahun anggaran tersebut.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada

Pemerintah tentang kinerja instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan Negara selama satu tahun anggaran 2021, dalam rangka menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berorientasi kepada prinsip akuntabilitas, efektifitas, transparansi dan efisiensi.

1.1.1 Tujuan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi tentang implementasi pelaksanaan AKIP dan capaian kinerja, dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi.
2. Untuk mengukur capaian kinerja aparatur OPD dan mengetahui permasalahan dan hambatan yang ditemui selama setahun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan Negara.
3. Untuk menyediakan bahan evaluasi dan memberikan feed back bagi penyusunan rencana kerja selanjutnya.

1.1.2. Dasar Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737).
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedomaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah;
14. Dokumen Rencana Startegis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

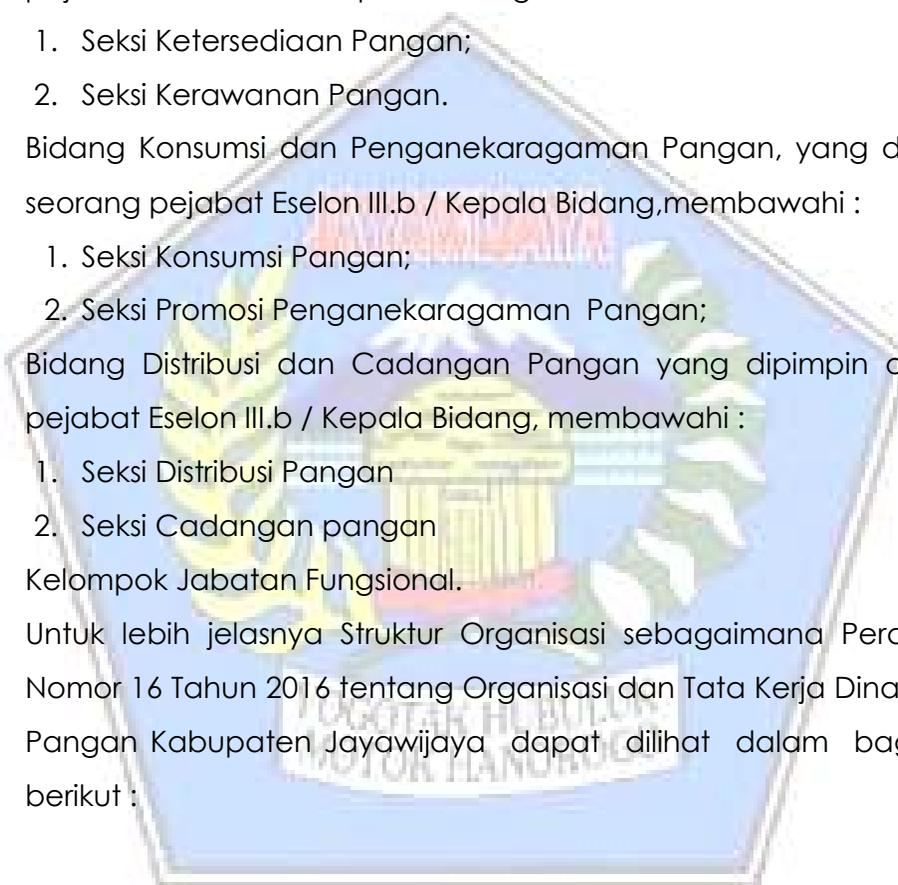
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI OPD.

1.2.1. Struktur Organisasi OPD.

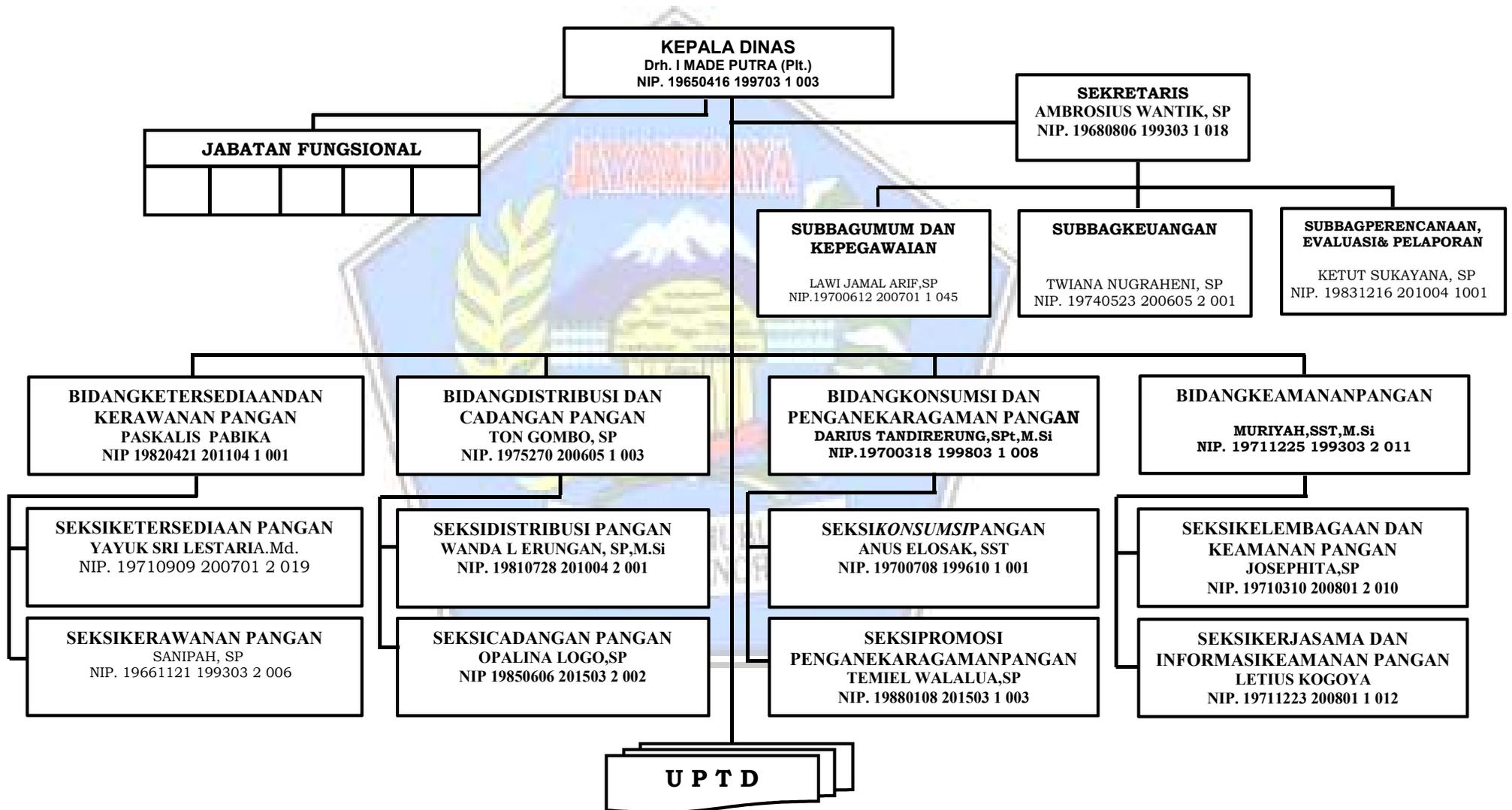
Struktur jabatan dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang pejabat Eselon III.a / Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang pejabat Eselon III.b / Kepala Bidang, membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, yang dipimpin oleh seorang pejabat Eselon III.b / Kepala Bidang, membawahi :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan;
- e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang dipimpin oleh seorang pejabat Eselon III.b / Kepala Bidang, membawahi :
 1. Seksi Distribusi Pangan
 2. Seksi Cadangan pangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1 :
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN JAYAWIJAYATAHUN 2021**



1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dibentuk sesuai instruksi Bupati Jayawijaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan peran dan fungsi bidang Ketahanan Pangan.

Sebagai mana Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagaiberikut:

1.2.2.1. Tugas Pokok

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal pelaksanaan urusan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

1.2.2.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas,Dinas Ketahanan Pangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusankebijakan dibidang Ketahanan pangan
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Pangan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas



dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan;
- d. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang keamanan pangan;
- e. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Sekretaris Dinas memimpin tugas kesekretariatan dinas untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan Kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan Dinas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

- d. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. mengelola sarana prasarana perkantoran, urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- f. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) sub Bagian Keuangan mempunyai uraian Tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;

- d. melakukan verifikasi pertanggung jawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- e. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta kerja sama.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- d. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Renja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP, LPPD, SPM dan laporan lainnya Dinas;

- e. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi, tatalaksana dan kerjasama;
- f. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan ketahanan pangan dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
- g. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi:

- a. Seksi Ketersediaan Pangan
- b. Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam urusan Ketersediaan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketersediaan pangan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang ketersediaan pangan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketersediaan pangan;
- d. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) ;
- e. menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- g. menyiapkan bahan pendampingan dibidang ketersediaan pangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Ketersediaan Pangan;
- i. menyiapkan bahan kordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional(HBKN)
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ketersediaan pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Kerawatan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kerawatan pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Seksi Kerawatan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis urusan Kerawatan Pangan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam urusan Kerawatan Pangan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kerawatan Pangan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten Jayawijaya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Kerawatan Pangan;

- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Kerawanan Pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, pemetaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang kerawanan pangan;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kerawanan Pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Membawahi:

- a. Seksi Distribusi Pangan
- b. Seksi Cadangan Pangan

Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang distribusi pangan. dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Distribusi Pangan;
- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang Distribusi Pangan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Distribusi Pangan;
- d. menyiapkan data dan informasi harga pangan, rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. menyiapkan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang distribusi pangan;
- g. mendistribusikan bantuan bahan pokok dan sarana produksi ke daerah rawan bencana;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang distribusi pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Cadangan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang cadangan pangan;
- b. mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang cadangan pangan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang cadangan pangan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Cadangan Pangan;
- e. melakukan penyiapan pangadaan, pengelolaan, dan peyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pemanfaatan desa mandiri pangan, pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- f. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan dan penyimpanan pangan yang layak;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang cadangan pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekaragaman pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi:

- a. Seksi Konsumsi Pangan
- b. Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang konsumsi pangan;
- b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang konsumsi pangan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang konsumsi pangan;
- d. menyiapkan perhitungan angka dan tingkat konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;

- e. Melakukan Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- f. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan dan peningkatan pangan keluarga ramah anak ;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang penataan permukiman;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang konsumsi pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam urusan promosi penganekaragaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang promosi penganekaragaman pangan;
- b. mengumpulkan, mensistemasi dan mengolah data dalam bidang promosi penganekaragaman pangan;

- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang promosi penganekaragaman pangan;
- d. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Menyiapkan promosi dan Pendampingan mitra kerja pemerintah (KTNA);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Promosi Penganekaragaman Pangan;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang promosi penganekaragaman pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Keamanan Pangan.

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang keamanan pangan.

Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan keamanan pangan.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

Bidang Keamanan Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan
- b. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kelembagaan dan keamanan pangan.

Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- b. mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan untuk sertifikasi sebagai jaminan keamanan pangan segar;
- e. Menyiapkan ijin keluar dan masuk sebagai jaminan keamanan pangan segar.
- f. menyiapkan bahan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan;

- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan keamanan pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. mengumpulkan, mensistemasi dan mengolah data dalam bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- e. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan keamanan pangan;
- f. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;

- g. menyiapkan bahan pendampingan dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Unit Pelaksana Teknis

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis, akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Untuk kondisi saat ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya belum memiliki unit pelayanan teknis yang tertentu di lapangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Jumlah Tenaga Fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Uraian tugas kelompok jabatan fungsional, adalah sebagai berikut :

- a. menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
- d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
- f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

TOTAL			1	3	3	9	6	22
-------	--	--	---	---	---	---	---	----

1.3.1.1.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan

Terdapat 2 pegawai yang menempati golongan IV, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 15 orang dan golongan II sebanyak 5 orang. Untuk jelasnya jumlah pegawai menurut golongan kepangkatannya digambarkan dalam Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

no.	UnitKerj	Golonga				Jmh
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretariat		2	4	0	6
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		1	3	0	4
4	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan		1	4		5
5	Bidang Keamanan Pangan		1	1	1	3
6	Bidang Konsumsida Penganekaragaman			3		3
7	Kelompok Fungsional					
TOTAL			5	15	2	22

1.3.1.1.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 5 orang, Diploma sebanyak 1 orang sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 13 orang dan

yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 3 Orang Dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Ketahanan Pangan didominasi oleh mereka yang berpendidikan S1 yaitu sebanyak 12 orang. Dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan kapasitas pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata pegawai Dinas Ketahanan Pangan cukup memadai, namun demikian tidak menutup kemungkinan masih diperlukan adanya penambahan personel untuk menunjang upaya peningkatan pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik.

Data pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jmh
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Kepala Dinas			1		1
2	Sekretariat	2		4		6
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	1	2		4
4	Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman			2	1	3
5	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	1		3	1	5
6	Bidang Keamanan	1		1	1	3
7	Kelompok Fungsional					
TOTAL		5	1	13		22

1.3.1.1.3. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, jumlah jabatan struktural yang telah terisi

adalah sebanyak 17 jabatan structural dari 17 formasi jabatan structural yang tersedia, ditambah dengan Staf dinas sebanyak 5 orang, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1.4. Untuk sementara ini formasi jabatan fungsional belum terisi. Kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di tiap-tiap unit organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11
4	Jabatan Fungsional	0
5	Staf	5
TOTAL		22

1.3.1.1.4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di Dinas Ketahanan Pangan sebagian besar merupakan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 15 orang dan pegawai perempuan berjumlah 7 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 1.5. dibawah ini.

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	5	1	6

3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan	2	2	4
4	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	3	2	5
5	Bidang Distribusi dan Cadangan	3	0	3
6	Bidang Keamanan Pangan	1	2	5
7	Kelompok Jabatan Fungsional			
TOTAL		15	7	22

1.3.1.1.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Ketahanan Pangan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan/jenjang eselon, maka berdasarkan perbandingan gender pemegang jabatan struktural pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya yaitu ASN dengan jenis kelamin laki-laki 14 Orang berkedudukan sebagai pemegang jabatan struktural (eselon II, III dan IV), dan 8 orang pejabat struktural berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya adalah staf.

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan/Jenjang Eselon pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

No.	Jabatan/Eselon	JenisKelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	5	6	11
4	Jabatan Fungsional	0	0	0
5	Staf	4	1	5
TOTAL		14	8	22

1.3.1.2. Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang

dimiliki Dinas Ketahanan Pangan. Adapun Jenis sarana dan prasarana berupa aset yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Ketahanan Pangan untuk sementara ini dirasakan telah dapat menunjang kinerja dinas, namun masih belum memadai bila dibandingkan dengan beban kerja organisasi. Secara umum asset khususnya asset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 1.7 Jumlah Aset Menurut Jenis s/d Tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda4	1	1	0	
2	Kendaraan roda2	11	11	0	
3	Meja kerja	49	49	0	
4	Kursi kerja	85	85	0	
5	Lemari	8	8	0	
6	Rak buku + Filling Cabinet	8	8	0	
7	Komputer PC	13	8	7	
8	Laptop	6	5	1	
9	Printer	13	5	8	
10	Mesin Fax	1	1	0	
11	Infocus	2	2	0	
12	Mesin Babat Rumput	6	1	5	

13	Televisi LCD 32"	1	1	0	
14	Wireless	2	2	0	
15	Scanner	1	1	0	

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya sudah dapat dikatakan memenuhi kebutuhan operasional dinas, namun seiring dengan beban kerja dinas sangat diperlukan adanya pemeliharaan rutin/berkala dan pengadaan sarana dan prasarana agar supaya dapat mendukung meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan program pembangunan di bidang pangan dan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.



BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah salah satu dokumen perencanaan daerah yang penyusunannya menjadi tanggung

jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didalamnya menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah kedalam Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, berpedoman pada RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rencana strategis disusun berdasarkan hasil analisa permasalahan di daerah, potensi pengembangan dan kebutuhan pembangunan untuk jangka waktu perencanaan 5 tahun.

Perencanaan yang dibuat di awal periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya hasil Pilkada tahun 2018, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang dituangkan kedalam program dan kegiatan sebagai langkah untuk mencapai tujuan pembangunan selama 5 tahun dan untuk menjadikan dasar bagi penyusunan rencana program pada periode berikutnya.

2.1.1. Gambaran Singkat Visi.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya berisi kumpulan seluruh program dan kegiatan selama 5 tahun merupakan kelanjutan dari Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan tahun 2018-2023. Rencana pembangunan bidang ketahanan pangan, yaitu khusus tahun pelaksanaan 2021 sampai dengan 2023, mengacu kepada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Renstra ini bertitik tolak dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Visi tersebut yaitu : **“Terwujudnya**

Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”

Penjelasan Visi:

1. Sejahtera, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia. Dengan melihat definisi sejahtera tersebut maka indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2023 dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gizi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Mandiri secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing. Dengan melihat definisi mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kemandirian pada akhir periode RPJMD tahun 2023 dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah sebagaimana cerminan ketersediaan sumber daya yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan kemandirian ekonomi, nilai investasi dimana selain berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga akan berdampak positif bagi meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga selain akan menurunkan angka pengangguran juga akan meningkatkan pendapatan per kapita, persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD sebagai cerminan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.
3. Berkualitas dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (*intelligentsia Question*), emosional

(*emotional Question*), dan *spiritual (spiritual Question)* serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing.

4. Berbudaya dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta. Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Jayawijaya yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide dan kreativitas sehingga pada akhir periode RPJMD masyarakat Jayawijaya mampu menghasilkan karya-karya budaya baik yang berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda, serta memiliki tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat dihormati oleh daerah lain.

2.1.2. Misi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
<p>“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”</p>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya
	Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
	Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
	Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan

Misi- misi pembangunan di atas dijelaskan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk terus melakukan reformasi birokrasi melalui empat aspek tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagai upaya peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan sudah dilaksanakan dengan baik pada periode 2013-2018, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil predikat penilaian pengelolaan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 5 tahun berturut-turut, predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuaskan.

Diharapkan pada masa akhir RPJMD tahun 2023 maka kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Misi Ke dua : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta sehat jasmani dan rohani dan mampu berdaya saing. Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil IPM Kabupaten Jayawijaya sebesar 52,94 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 55,99 pada akhir RPJMD TAHUN 2018. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2023.

Misi Ketiga : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan; Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pendekatan kewilayahan dengan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing secara berkelanjutan. Isu pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan produk unggulan local, menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas, mengingat Kabupaten

Jayawijaya memiliki potensi unggulan local di bidang pertanian sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pada akhir periode RPJMD tahun 2023 kondisi masyarakat jayawijaya berada pada kondisi yang mampu berdaya saing dari sisi ekonomi serta mampu berinovasi dalam pengembangan produk local yang menjadi produk unggulan daerah.

Misi Keempat : Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP); Misi ini dimaksudkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membentuk/menciptakan penduduk yang bermartabat, memiliki norma-norma sosial dan agama yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, guna terbangunnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, serta manusia dan lingkungannya. Dengan mengedepankan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan kondisi aman, tentram dan damai walaupun masih ada peristiwa – peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tentram pada masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, selama ini kita telah meningkatkan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di

masyarakat, disamping itu dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Kabupaten Jayawijaya dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan.

Misi Kelima : Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan dan menyediakan infrastruktur daerah termasuk regulasi yang memberikan akses kemudahan bagi pengembangan sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan. Peningkatan sarana dan prasarana public yang memadai maka dapat mendukung peran Kabupaten Jayawijaya sebagai pusat jasa di Wilayah Pegunungan Tengah Papua.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria-kriteria indikator yang baik dan berkualitas.

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. Merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, paling tidak dapat memenuhi seluruh indikator sasaran pokok RPJPD pada periode RPJMD berjalan; dan;
5. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD

Tabel 2.2. Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
<p>“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”</p>	<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel;</p>	<p>Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN</p>
			<p>Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p>
			<p>Meningkatnya kemandirian fiskal</p>
			<p>Optimalnya pelayanan pemerintahan kampung</p>
	<p>Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya</p>	<p>Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan</p>
			<p>Meningkatnya budaya baca pada masyarakat</p>
			<p>Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah</p>
			<p>Meningkatnya prestasi Olah Raga</p>
			<p>Mengoptimalkan Upaya, Derajat, dan Promosi Kesehatan</p>
			<p>Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat</p>

	Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
			Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif
			Meningkatnya penanaman modal
			Menurunnya persentase KK miskin
			Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat
	Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);	Meningkatkan kelestarian budaya yang ada di masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
			Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya
	Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sektor	Meningkatnya kualitas aksesibilitas masyarakat
			Meningkatnya infrastruktur energi listrik terhadap RT

		jasa dan pariwisata secara berkelanjutan	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur perkampungan
			Terwujudnya manajemen perhubungan yang berkualitas
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Masyarakat
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim
			Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan yang dijabarkan melalui tujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran :

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan;
2. Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif;
3. Meningkatnya penanaman modal;
4. Menurunnya persentase KK miskin
5. Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat

Pemerintah memiliki tanggung jawab mengusung konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan secara instan memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, melainkan memberikan cara untuk dapat membangun pribadi masyarakat menjadi sebuah profil yang mandiri, memiliki kualitas yang memadai dan mampu bersaing. Kemampuan untuk bersaing adalah mutlak diperlukan karena masing-masing kelompok secara komunal memiliki standar persaingannya sendiri-sendiri. Pada akhirnya pemerintah pun dituntut untuk mampu berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengantarkan masyarakatnya untuk mampu beradaptasi dengan perubahan.

Selanjutnya sebagai implementasi visi dan misi tersebut, DKP menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dengan matriks rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 1.

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021.

Sesuai tujuan yang hendak dicapai, kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yang juga merupakan Komitmen Perjanjian Kinerja Dinas Krtahanan Pangan tahun 2021

terhadap Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Jayawijaya. Komitmen tersebut terdiri dari rencana pencapaian kinerja melalui pelaksanaan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Mengupayakan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Mengupayakan meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur.
3. Menyelenggarakan pengelolaan program yang baik dan sistem administrasi yang akuntabel serta mengupayakan capaian kinerja yang optimal.
4. Mengkoordinasikan dan fasilitasi upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan daerah, yang meliputi ketersediaan dan cadangan pangan secara berkelanjutan, penanganan rawan pangan, sistem distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan gizi, dan keamanan pangan.

2.2.1. Komitmen Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.

Komitmen Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya merupakan pernyataan kesungguhan OPD untuk merealisasikan pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018-2023 melalui rencana kerja tahunan. Rencana Kerja DKP tahun 2021 adalah pelaksanaan Renstra OPD yang pada prinsipnya diarahkan untuk meningkatkan status ketahanan pangan daerah melalui pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) Peningkatan ketersediaan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan.
- 2) Peningkatan kualitas kinerja sumberdaya aparatur.

Penetapan target kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 berdasarkan penetapan Misi dan Tujuan OPD, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

Misi 1. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparatur menyangkut aspek pelayanan ketahanan pangan masyarakat.

Tujuan 1.1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,

Sasaran 1.1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Target Tahun 2023
1.	Tersedianya Jumlah Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 20.000.000,- DAU	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 20.000.000,- DAU
2.	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 14.370.000,- DAU	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 20.000.000,- DAU
3.	Tertelaksananya Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen lakip SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 6.950.000,- DAU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 15.000.000,- DAU
4.	Jumlah komponen listrik yang disediakan	3 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.234.000,- DAU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 6.000.000,- DAU
5.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor selama 1 Tahun	46 Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 41.753.596,- DAU	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 60.000.000,- DAU

6.	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 15.00.000,- DAU	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 15.00.000,- DAU
7.	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1 kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 99.402.000,- DAU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 150.000.000,- DAU
8.	Jumlah Jasa Internet dan Listrik yang dibayarkan	2 Paket	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 24.700.000,- DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 30.000.000,- DAU
8.	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	1 Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 24.000.000,- DAU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 24.000.000,- DAU
9.	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	10 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 5.900.000,- DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 5.900.000,- DAU
10	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	28 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 36.000.000,- DAU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 60.000.000,- DAU
11	Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan dan Dokumen Yang tersusu	1 Dokumen	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Rp. 65.000.000,- DAU	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Rp. 100.000.000,- DAU
12	Jumlah lokasi pembinaan dan fasilitasi upaya penyediaan bahan pangan lokal	4 kelompok /Kampung	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp. 200.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp. 300.000.000

13	Jumlah Realokasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7 KELOMPOK	OTSUS Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 400.000.000	OTSUS Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 600.000.000
14	Jumlah Kelompok Pemberdayaan pangan masyarakat	5 KWT	OTSUS Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp. 350.000.000	OTSUS Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp. 350.000.000
16	Jumlah kampung yang dipasilitasi, peningkatan kapasitas ASN dan dokumen yang tersusun	1 DOKUMEN	DAK NON FISIK Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp. 67.517.000	DAK NON FISIK Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp. 150.000.000
17	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Pangan Segar diawasi	3 ASN	DBH Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Rp. 68.709.000 DAU	DBH Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Rp. 90.000.000 DAU

Jumlah anggaran tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 362.018.596,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), Dana Bagi Hasil Rp. 67.517.000 (Enam Pulu Tujuh Juta Liam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) Dana Otonomi Khusus Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana Dak Non Fisik Rp. 350.000.000,0 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Target kinerja ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan rutin SKPD untuk pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran selama satu

tahun anggaran, lokasi pekerjaan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, melibatkan seluruh personil yang ada dengan pembagian tugas sesuai dengan beban tugas masing-masing.

2.2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja OPD.

Sebagaimana bahwa dalam implementasi AKIP perlu diberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, dan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja OPD yang bersangkutan.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada pencapaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.4. Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerjaDKP Kab. Jayawijaya tahun 2021

No.	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	2	3	4
1.	86 – 100 %	Delapan Puluh Enam Persen sampai dengan Seratus Persen.	Sangat Berhasil
2.	71 – 85 %	Tujuh Puluh Satu Persen sampai dengan Delapan Puluh Lima Persen.	Berhasil

3.	56 – 70 %	Lima Puluh Enam Persen sampai dengan Tujuh Puluh Persen.	Cukup Berhasil
4.	1 - 55 %	Satu Persen sampai dengan Lima Puluh Lima Persen.	Tidak Berhasil

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sebagai tindakan awal evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Hasil pengukuran merincikan informasi tentang tingkat prestasi pencapaian tujuan dan sasaran, akuntabilitas kinerja, serta adanya masalah dan hambatan yang ditemui selama setahun pelaksanaan seluruh kegiatan. Kinerja DKP diukur dengan menggunakan analisis realisasi capaian target pada tahun laporan dan analisis perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja meliputi analisa terhadap indikator-indikator yang dihasilkan dari pencapaian sasaran pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Aspek keterkaitan dengan tujuan dan sasaran RENSTRA
- b. Aspek kesesuaian dengan RENJA
- c. Aspek efektifitas dan efisiensi
- d. Aspek manfaat.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Evaluasi dan analisis dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan terhadap pencapaian masing-masing sasaran. Analisis capaian kinerja DKP tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja DKP Kab. Jayawijaya tahun 2021

Misi 1.	Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparatur menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat dan penyuluhan				
Tujuan1.1.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,				
Sasaran1.1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Atribut
1.	Tersedianya Jumlah Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
2.	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	98,28 %	Sangat Berhasil
3.	Terlaksananya Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen lakip SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Sangat Berhasil
4.	Jumlah komponen listrik yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%	Sangat Berhasil
5.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor selama 1 Tahun	46 Jenis	46 Jenis	100%	Sangat Berhasil
6.	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	98,62 %	Sangat Berhasil
7.	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan	89,96 %	Berhasil

8.	Jumlah Jasa Internet dan Listrik yang dibayarkan	2 Paket	2 Paket	83,68 %	Sangat Berhasil
8.	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	Sangat Berhasil
9.	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	10 Unit	10 Unit	71,86 %	Sangat Berhasil
10	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	28 Unit	28 Unit	98,07 %	Sangat Berhasil
11	Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan dan Dokumen Yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	96,17 %	Sangat Berhasil
12	Jumlah lokasi pembinaan dan fasilitasi upaya penyediaan bahan pangan lokal	2 kelompok /Kampung	2 kelompok /Kampung	99,10 %	Sangat Berhasil
13	Jumlah Realokasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7 KELOMPOK	7 KELOMPOK	99,88 %	Sangat Berhasil
14	Jumlah Kelompok Pemberdayaan pangan masyarakat	5 KWT	5 KWT	100 %	Sangat Berhasil
16	Julah kampung yang difasilitasi, peningkatan kapasitas ASN dan dokumen yang tersusun	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	99,85 %	Sangat Berhasil
17	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Pangan Segar diawasi	3 ASN	3 ASN	99,95 %	Sangat Berhasil

Pelaksanaan program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran merupakan implementasi misi DKP atas kebutuhan rutin OPD untuk pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun anggaran 2021. Terdapat sebelas kegiatan yang dilaksanakan, lokasi pekerjaan di kantor DKP Kabupaten Jayawijaya, melibatkan seluruh personil DKP dengan pembagian tugas sesuai beban tugas

masing-masing. Penempatan program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 10 kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2018-2023 maupun dengan Rencana Kerja Tahun 2021 .

Program dan kegiatan pendukung yang merupakan tindakan dari upaya pencapaian sasaran 1.1 selama tahun anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran

- Misi 1. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparatur menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat dan penyuluhan.
- Tujuan 1.1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,
- Sasaran 1.1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sumber dana
1.	Tersedianya Jumlah Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000 DAU
2.	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.950.000 DAU
3.	Tersedianya Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen lakip SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.370.000 DAU
4.	Jumlah komponen listrik yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.234.000 DAU
5.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor selama 1 Tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.753.596 DAU
6.	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.210.000 DAU

7.	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.402.000 DAU
8.	Jumlah Jasa Internet dan Listrik yang dibayarkan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.700.000 DAU
9.	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	Jumlah Jasa Internet dan Listrik yang dibayarkan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.000.000 DAU
10.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.900.000 DAU
11.	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.790.000 DAU
12.	Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan dan Dokumen Yang tersusu	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	65.000.000 DAU
13.	Jumlah lokasi pembinaan dan fasilitasi upaya penyediaan bahan pangan lokal	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	200.000.000 OTSUS
14.	Jumlah Realokasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	450.000.000 OTSUS
15.	Jumlah Kelompok Pemberdayaan pangan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	350.000.000 DAK NON FISIK
16.	Jumlah kampung yang difasilitasi, peningkatan kapasitas ASN dan dokumen yang tersusun	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	67.517.000 DBH
17.	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Pangan Segar diawasi	PROGRAM PENGAWASAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	68.709.000 DAU

Secara umum penyelenggaraan program ini cukup efektif dan manfaatnya terlihat pada aktifitas harian DKP Kabupaten Jayawijaya yang selalu aktif melayani para penyuluh, masyarakat tani dan stake holder lainnya, terkait dengan urusan pengembangan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian. Hampir seluruh tugas rutin DKP dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak ditemui adanya permasalahan yang menghambat, sehingga untuk pencapaian target kinerja dapat diberi status dengan atribut Sangat Berhasil.

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan dan Indikator Pendukung Pencapaian Sasaran

Misi 1.	Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparatur menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat dan penyuluhan.			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Keg.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Prioritas Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Sasaran Daerah	Meningkatnya Transparansi & Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
Indikator Kinerja	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur dan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan	Penyusunan Dokumen	20.000.000 DAU

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	6.950.000 DAU
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)	14.370.000 DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	5.234.000 DAU
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	41.753.596 DAU
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Ketahanan Pangan)	15.210.000 DAU
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Ketahanan Pangan)	99.402.000 DAU
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Ketahanan Pangan)	24.700.000 DAU
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Ketahanan Pangan)	24.000.000 DAU
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	5.900.000 DAU

11		Operasional atau Lapangan (Dinas Ketahanan Pangan)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Ketahanan Pangan)	35.790.000 DAU

Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung sasaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar 99,40 %.

Tabel 3.4. Program , Kegiatan dan Indikator Pencapaian Sasaran Tahun 2021,

Misi 1.	Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparatur menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat dan penyuluhan.			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Keg.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
Prioritas Daerah	Pengembangan potensi ekonomi local yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata infrakstruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan			
Sasaran Daerah	Meningkatnya Perekonomian Pada sector Produktif			
Indikator Kinerja	Terjaganya Kestabilan Ketersediaan Pangan dan Peningkatan Pola Konsumsi Masyarakat/ Rumah Tangga			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sumber dana
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	65,000,000 DAU

2		Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	(Dinas Ketahanan Pangan)	
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal(Dinas Ketahanan Pangan)	200.000.000 OTSUS
3		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	450.000.000 OTSUS
4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dinas Ketahanan Pangan)	350.000.000 DAK NON FISIK
5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	67,517,000 DBH
6	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan)	68,709,000 DAU

Realisasi Program dan Kegiatan sasaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar 99,78 %.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumberdaya yang dilaksanakan secara bijaksana sebagai implementasi pelaksanaan azas akuntabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka LAKIP sekaligus juga memuat tentang laporan realisasi belanja langsung APBD maupun APBN.

Data realisasi belanja langsung DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 atas pelaksanaan 4 program yang terdiri dari 10 kegiatan. Untuk merealisasikan program dan kegiatan tersebut, DKP Kabupaten Jayawijaya didukung dengan alokasi anggaran dari APBD tahun 2021.

Besarnya total anggaran khusus untuk Belanja Langsung tersebut dapat direalisasikan dengan baik, rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pagu anggaran Belanja Langsung DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 per sumber dana dan realisasinya.

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	362.018.596	345.170.298	95,35
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	132.517.000	129.930.175	98,05
3	Dana Otonomi Khusus (Otsus)	650.000.000	647.684.000	99,64

4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	350.000.000	350.000.000	100
	Jumlah	1.494.535.596	1.472.784.473	99,54 %

Selanjutnya realisasi per alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja langsung program dan kegiatan selama tahun anggaran 2019, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.6. Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung APBD DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

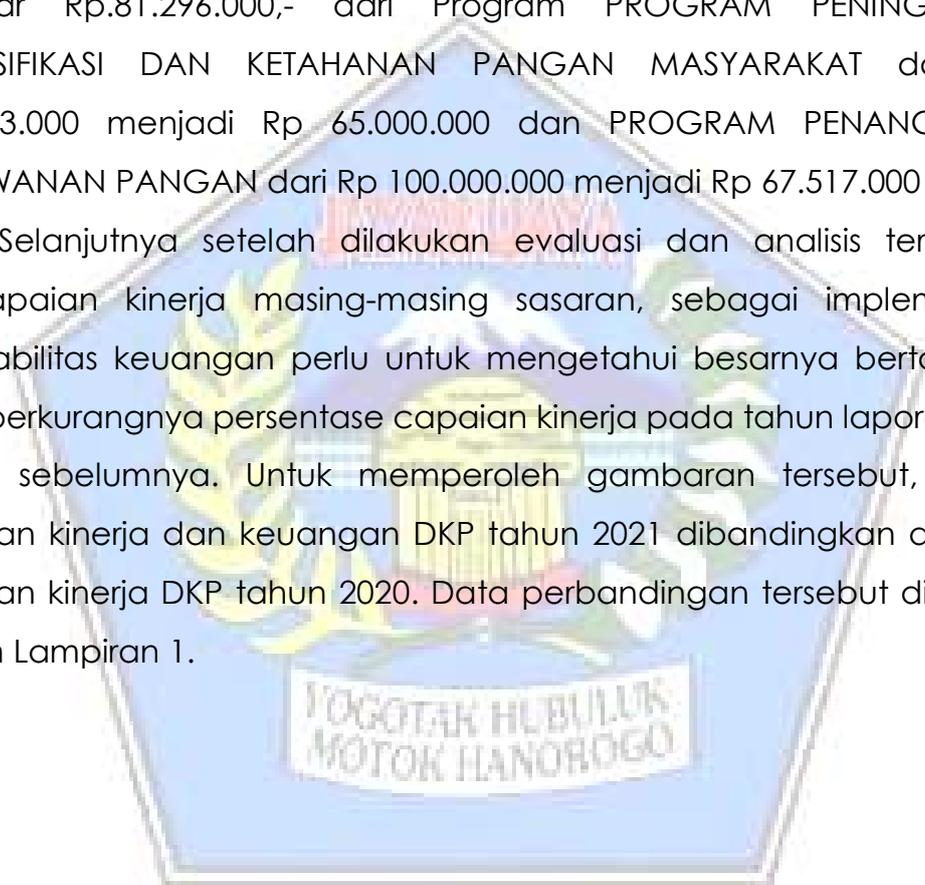
KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		5.064.177.375	4.190.632.022	3.959.153.993	94,48
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.781.655.375	2.989.406.022	2.762.863.118	92,42
2	9	1	02.01		Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		69.440.000	41.320.000	41.072.500	99,40
2	9	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
2	9	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000	6.950.000	6.950.000	100,00
2	9	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29.440.000	14.370.000	14.122.500	98,28
2	9	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.419.335.779	2.696.096.426	2.486.369.520	92,22
2	9	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.419.335.779	2.696.096.426	2.486.369.520	92,22
2	9	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		161.389.596	161.599.596	151.411.098	93,70

2	9	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.234.000	5.234.000	5.234.000	100,00
2	9	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	41.753.596	41.753.596	41.753.596	100,00
2	9	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000	15.210.000	15.000.000	98,62
2	9	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99.402.000	99.402.000	89.423.502	89,96
2	9	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48.700.000	48.700.000	44.670.000	91,72
2	9	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24.700.000	24.700.000	20.670.000	83,68
2	9	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00
2	9	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82.790.000	41.690.000	39.340.000	94,36
2	9	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.900.000	5.900.000	4.240.000	71,86
2	9	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58.890.000	35.790.000	35.100.000	98,07
2	9	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18.000.000	0	0	0,00
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.113.813.000	1.065.000.000	1.060.197.000	99,55
2	9	3	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		265.000.000	265.000.000	260.716.000	98,38
2	9	3	02.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	65.000.000	65.000.000	62.513.000	96,17

2	9	3	02.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua	200.000.000	200.000.000	198.203.000	99,10
2	9	3	02.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		450.000.000	450.000.000	449.481.000	99,88
2	9	3	02.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua	450.000.000	450.000.000	449.481.000	99,88
2	9	3	02.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		20.000.000	-	0	0,00
2	9	3	02.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	20.000.000	-	0	0,00
2	9	3	02.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		378.813.000	350.000.000	350.000.000	100,00
2	9	3	02.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	28.813.000	-	0	0,00
2	9	3	02.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100,00
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		100.000.000	67.517.000	67.417.175	99,85
2	9	4	02.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		100.000.000	67.517.000	67.417.175	99,85
2	9	4	02.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100.000.000	67.517.000	67.417.175	99,85
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		68.709.000	68.709.000	68.676.700	99,95
2	9	5	02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		68.709.000	68.709.000	68.676.700	99,95
2	9	5	02.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	68.709.000	68.709.000	68.676.700	99,95

Dari tampilan data tersebut pada Tabel 9 dapat diketahui rata-rata realisasi keuangan Belanja langsung adalah sebesar ,94,48 %. Terdapat Perubahan anggaran (Pengurangan)dari sumber dana DAU sebesar Rp.792.249.353,- dari **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dari Rp.3.850.364.375,- Berkurang Menjadi menjadi Rp 305.8115.022,-) dan Dari sumber dan DBH Sebesar Rp.81.296.000,- dari Program PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT dari Rp 113.813.000 menjadi Rp 65.000.000 dan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN dari Rp 100.000.000 menjadi Rp 67.517.000

Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja masing-masing sasaran, sebagai implementasi akuntabilitas keuangan perlu untuk mengetahui besarnya bertambah atau berkurangnya persentase capaian kinerja pada tahun laporan dari tahun sebelumnya. Untuk memperoleh gambaran tersebut, maka capaian kinerja dan keuangan DKP tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja DKP tahun 2020. Data perbandingan tersebut disajikan dalam Lampiran 1.



BAB. IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN.

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 yang diusulkan melalui Rencana Kerja Tahun 2021 sebanyak 4 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan 21 sub Kegiatan dapat diakomodir penganggarnya sebanyak 4 program dan 11 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dari APBD tahun 2021.

Dari seluruh uraian pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama setahun 2021 berjalan dengan baik, secara umum capaian kinerja Belanja langsung dan tidak langsung rata-rata 94,48 %, mendapatkan sebutan Berhasil. Penempatan program dan kegiatan yang menggunakan APBD tahun 2021 didasarkan kepada prioritas pemberdayaan masyarakat dan pelaku agribisnis.

Manfaat yang diperoleh disamping meningkatkan produksi dan produktivitas pangan lokal, antara lain juga meningkatkan motivasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan pengembangan kemandirian pangan keluarga, meningkatkan PKS (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) masyarakat, menumbuhkan semangat kerjasama antar kelompok masyarakat, membuka wawasan dan peluang usaha, serta menumbuhkan kesadaran pengembangan ekonomi produktif secara berkelompok.

Belanja langsung DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 didukung dengan alokasi anggaran dari APBD. Besarnya total anggaran khusus untuk Belanja Langsung maupun tidak langsung tersebut sebesar Rp 4.190.632.022,-.

4.2. PERMASALAHAN.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 tidak ditemui permasalahan di lapangan yang dapat mengganggu ataupun menghambat jalannya proses kerja fisik, semua aspek pelaksanaan dapat ditangani dengan baik oleh para petugas yang sudah dipersiapkan dan profesional.

Permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan administrasi keuangan, dikarenakan terjadinya refofusing akibat pandemic COVID – 19 yang mengharuskan terjadinya pengurangan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT.

Bertitik tolak dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 yang kemudian dilakukan perhitungan akumulasi capaian kinerja Renstra tahun 2018 – 2023 hingga tahun 2021, maka perlu dibuat rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Untuk menunjang percepatan pembangunan pertanian dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui fasilitasi APBD dan APBN.

2. Tetap melanjutkan pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani melalui fasilitasi APBD.
3. Mengusulkan untuk menambah tenaga profesional, baik melalui seleksi penerimaan tenaga honorer/Tenaga Harian Lepas ataupun pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga terpenuhi kebutuhan operasional ketahanan pangan di lapangan.
4. Mengusulkan untuk menambah penyediaan anggaran untuk biaya operasional petugas lapangan bagi pengembangan ketahanan pangan secara proporsional dan berkelanjutan, baik melalui fasilitasi APBD maupun APBN



Wamena, 19 Januari 2022
Kepala DKP Kab. Jayawijaya



Drh. IMADE PUTRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650416 199703 1 003

RUMUSAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB. KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				PRIORITAS		KELOMP OK SASARAN	CATA TAN PENTI NG	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGE T CAPAI AN	PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA	NASION AL	DAERAH			TARGE T CAPAIA N	PAGU INDIKATIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
02.09	BIDANG PANGAN											
02.09	DINAS KETAHANAN PANGAN											
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH	Capaian administrasi umum dan keuangan	Jayawijaya	100%	727.496.000			Peningkatan Tata Kelola Pemerintah n yang baik		100%		1.627.250.000
2.09.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi		1 Tahun	80.000.000							105.000.000
2.09.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi	Wamena	12 Bulan	60.000.000	DAU				12 Bulan		80.000.000
2.09.01.2.01.0 5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah	Jayawijaya	12 Bulan	20.000.000	DAU				12 Bulan		25.000.000

2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun			15.000.000s							20.000.000
2.09.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	15.000.000	DAU			Dinas Ketahanan Pangan		1 Dokumen	20.000.000
2.09.01.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan		632.496.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Umum			1.502.250.000
2.09.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk	Dinas Ketahanan Pangan	1 Tahun	3.500.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		1 Tahun	10.000.000
2.09.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Telepon, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	24.900.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		12 Bulan	25.000.000
2.09.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi pemeliharaan dan perizinan	Dinas Ketahanan Pangan	21 Unit	6.000.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		21 Unit	7.500.000
2.09.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	24.000.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		12 Bulan	36.000.000
2.09.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yg disediakan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	28.684.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		12 Bulan	75.000.000
2.09.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	13.352.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		12 Bulan	60.000.000

2.09.01.2.03.1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penera ngan yang dise diakan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	5.388.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		12 Bulan	20.000.000
2.09.01.2.03.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Ketahanan Pangan	10 Jenis	4.440.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		10 Jenis	20.000.000
2.09.01.2.03.1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disedia kan	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	24.630.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		12 Bulan	60.000.000
2.09.01.2.03.1 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Luar Daerah	12 Bulan	344.015.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		12 Bulan	450.000.000
2.09.01.2.03.0 1	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	Wamena					Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		1 unit	700.000.000
2.09.01.2.03.2 2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah testkit yang diadakan	Wamena	5 Set	21.187.000	DBH		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		5 Set	33.750.000
2.09.01.2.03.2 4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Wamena	3 unit laptop dan 1 unit printer	55.000.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		15 unit	200.000.000
2.09.01.2.03.2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	18.000.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		1 Unit	50.000.000

2.09.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Wamena	1 Unit mobil, 20 Unit Spd. motor	45.000.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		1 Unit mobil, 20 Unit Spd. motor	75.000.000
2.09.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Ketahanan Pangan	42 Unit	14.400.000	DAU		Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		42 Unit	30.000.000
2.09.01.2.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	Wamena	1 Unit				Peningkatan tata kelola pemerin tahan	Dinas Ketahanan Pangan		1 unit	350.000.000
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama		2.388 Kkal/ka pita/ tahun								6.000.000.000
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah	Tersedianya infrastruktur yang mendukung kemandirian pangan		5 Unit								6.000.000.000
2.09.02.2.01.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	Kosihilapok dan Parema	2 Unit					Masyarakat tani		2 Unit	1.600.000.000
2.09.02.2.01.2	Penyediaan Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang di bangun	Kosihilapok dan Parema	2 Unit (200 M2)					Masyarakat tani		2 Unit (200 M2)	2.200.000.000

2.09.02.2.01.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Rumah Produksi yang dibangun dan perlengkapan lainnya	Wamena	1 unit beserta perlengkapan lainnya					Masyarakat tani		1 unit beserta perlengkapan lainnya	2.200.000.000
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya ketersediaan pangan utama dan distribusi pangan		2.388 Kkal/kapita/tahun	763.813.000							6.395.000.000
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka menstabilkan pasokan dan harga Pangan	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka menstabilkan pasokan dan harga pangan		50%	265.000.000							2.200.000.000
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM yang disusun	Wamena	1 Dokumen NBM	65.000.000	DAU		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Ketahanan Pangan		1 Dokumen NBM	100.000.000
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi pembinaan dan fasilitasi upaya penyediaan bahan pangan lokal	Kurulu (Umpagalo), Silokarnodoga (Elaboge)	2 Desa	200.000.000	Otsus					2 Desa	700.000.000
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stock, Pasokan dan harga Pangan	Jumlah laporan stock, pasokan dan harga pangan yang tersusun	Wamena	1 Dokumen							1 Dokumen	100.000.000

	Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	keamanan pangan segar										
2.09.05.2,01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar	MWA Bogor	3 Orang	69.000.000	DAU		Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan		3 Orang	100.000.000
2.09.05.2,01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pedagang dan petani yang mengikuti sosialisasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Wamena	50 Orang	50.000.000	DBH		Pengembangan potensi ekonomi local yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata, infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Masyarakat tani		100 Orang	100.000.000
2.09.05.2,01.05	Penyediaan sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laboratorium dan rumah petugas mutu dan keamanan pangan yang dibangun	Wamena	2 unit					Dinas Ketahanan Pangan		1 unit	2.500.000.000
TOTAL					1.710.309.000							16.832.250.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2019 -2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN (Permendagri No. 13 thn 2010)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN (Permendagri No. 90 thn 2019)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KINERJA KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF										Kondisi Kinerja akhir periode	Rupiah (000)	Unit Kerja	Lokasi
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
								Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik	2.21.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian administrasi umum dan keuangan			511.522		634.000		727.496		3.820.750		3.031.000		11.724.768		
				2.9.1.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian administrasi umum dan keuangan			-		-		80.000		105.000		120.000		305.000		
				2.9.1.1.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi			-		12 bulan	60.000	12 bulan	80.000	12 bulan	90.000	60 bulan	230.000	DKP	Wamena dan Jayapura	
				2.9.1.1.01.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah			-		12 bulan	20.000	12 bulan	25.000	12 bulan	30.000	60 bulan	75.000	DKP	Wamena	

				2.9.1.1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun			15.000		10.000		15.000		20.000		25.000		85.000		
				2.9.1.1.02.6	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP	1 Dokumen	Dokumen	15.000	Dokumen	10.000	Dokumen	15.000	Dokumen	20.000	Dokumen	25.000	5 Dokumen	85.000	DKP	Wamena
		2.21.2.21.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.9.1.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan			2.730		4.000		78.909		91.000		356.000		3.152.639		
		2.21.01.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.9.1.2.03.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk		1 Tahun	3.000	12 Bulan	10.000	1 Tahun	3.500	1 Tahun	10.000	1 Tahun	10.000	5 Tahun	36.500	DKP	Wamena
		2.21.01.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2.9.1.2.03.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Telepon, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor		12 bulan	20.000	12 bulan	25.000	12 bulan	24.900	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000	60 bulan	119.900	DKP	Wamena
		2.21.01.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	2.9.1.2.03.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi pemeliharaan dan perizinan	PKB 1 unit mobil dan 20 unit sepeda Motor	unit mobil dan 20 unit sepeda Motor	7.000	1 unit mobil dan 20 unit sepeda Motor	10.000	1 unit mobil dan 20 unit sepeda Motor	6.000	1 unit mobil dan 22 unit sepeda Motor	10.000	1 unit mobil dan 24 unit sepeda Motor	10.000	PKB 5 th (1 unit mobil dan 24 unit sepeda Motor)	43.000	DKP	Wamena

		.2.21.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.9.1.2.03.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar		12 OB	24.000	12 OB	24.000	12 OB	24.000	12 OB	36.000	12 OB	36.000	60 OB	144.000	DKP	Wamena
		.2.21.01.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.9.1.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yg disediakan		12 bulan	28.900	12 bulan	40.000	12 bulan	28.684	12 bulan	75.000	12 bulan	80.000	60 bulan	252.584	DKP	Wamena
		.2.21.01.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.9.1.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan		12 bulan	10.000	12 bulan	25.000	12 bulan	13.352	12 bulan	60.000	12 bulan	70.000	60 bulan	178.352	DKP	Wamena
		2.21.01.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.9.1.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yg disediakan		12 bulan	4.902	12 bulan	5.000	12 bulan	5.388	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	60 bulan	55.290	DKP	Wamena
		2.21.01.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.9.1.2.03.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 bulan	5.000	10 Jenis	5.000	10 Jenis	4.440	10 Jenis	20.000	10 Jenis	20.000	50 Jenis	54.440	DKP	Wamena
		2.21.01.01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	2.9.1.2.03.14	Penyediaan peralatan rumah tangga bagi kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga bagi Kantor yang disediakan		12 Bulan	15.000	10 Jenis	10.000			15 Jenis	25.000	15 Jenis	25.000	30 Jenis	75.000	DKP	Wamena

		2.21.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	2.9.1.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat yang disediakan		12 bulan	14.928	12 bulan	15.000	12 bulan	24.630	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	60 bulan	174.558	DKP	Wamena
		2.21.01.01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2.9.1.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti		12 bulan	300.000	12 bulan	300.000	12 bulan	344.015	12 bulan	450.000	12 bulan	500.000	60 bulan	1.015	DKP	Wamena
		2.21.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/Survey Lapangan/ Monitoring dalam Daerah			Jumlah Monitoring dan Evaluasi		12 bulan	50.000	12 bulan	75.000							24 bulan	5.000	DKP	Wamena
		2.21.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.9.1.2.03.	Administrasi Umum	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja			2.013.792		.080.000		153.587		2.838.750	0			16.129		
		2.21.01.02.02	Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas			Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	unit Rumah Dinas		-	-	-		-	1 unit rumah dinas	700.000	1 unit rumah dinas	700.000	6 unit rumah dinas	1.400.000	DKP	Wamena

		.2.21.01.02.03	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor/ Gedung Kantor DKP			Jumlah Pagar Gedung Kantor DKP yang di bangun	1 Unit (150 m)	150 M2	982.500	1 Unit Gedung Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan	700.000	1 Unit (200 m)	-	1 Unit (140 m)	1.400.000	-	-	1 Unit (450 m)	3.082.500	DKP	Wamena
		.2.21.01.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	2.9.1.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	1 unit mobil dan 20 unit sepeda motor	3 Unit sepeda Motor	87.340			-		-	2 unit kendaraan dinas sepeda motor	70.000	1 unit Mobil 22 unit sepeda motor	157.340	DKP	Wamena	
		2.21.01.02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.9.1.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Teskit yang diadakan	21 set teskit	set teskit	6.750	5 Set Teskit	35.000	5 set Teskit	21.187	5 set Teskit	33.750	5 set Teskit	35.000	28 unit meja+kursi dan 22 set teskit	131.687	DKP	Wamena
		.2.21.01.02.08	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.9.1.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg diadakan	unit printer, 8 unit Computer PC, 2 Unit Laptop	Laptop, 2 computer PC, 6 Kursi Jabatan	97.202	2 Unit Printer, 2 unit Computer PC, 2 unit Laptop	60.000	3 unit Laptop dan 1 unit Printer	55.000	10 unit Laptop dan 5 unit Printer	200.000	10 unit Laptop dan 5 unit Printer	200.000	8 unit komputer PC, 22 unit Laptop dan 23 unit Printer	612.202	DKP	Wamena
		2.21.01.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.9.1.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		unit gedung kantor DKP	1 Unit gedung kantor	10.000	1 unit gedung kantor DKP	10.000	1 unit gedung kantor DKP	18.000	1 unit gedung kantor DKP	50.000	1 unit gedung kantor DKP	50.000	1 unit gedung kantor DKP	138.000	DKP	Wamena
		.2.21.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	2.9.1.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan yang difasilitasi	1 unit mobil + 20 unit sepeda motor	unit mobil + 20 unit sepeda motor	39.000	1 unit mobil + 20 unit sepeda motor	45.000	1 unit mobil + 22 unit sepeda motor	45.000	1 unit mobil + 22 unit sepeda motor	75.000	1 unit mobil + 22 unit sepeda motor	75.000	1 unit mobil + 22 unit sepeda motor	279.000	DKP	Wamena

		.2.21.01.02.26	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	2.9.1.2.03.30	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kerja yg terpelihara	-	-	15 Kursi dan 15 Meja Kerja	15.000	-	-	-	1 Paket	20.000	1 Paket	000		Wamena		
		.2.21.01.02.27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.9.1.2.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara	10 unit komputer, 6 unit laptop, 15 unit printer,	5 unit komputer, 6 unit printer	5 unit komputer, 6 unit printer,	15.000	14.400	5 unit komputer, 6 unit printer, 31 unit meubelair	30.000	5 unit komputer, 6 unit printer, 31 unit meubelair	30.000	25 unit komputer, 30 unit printer, 93 meubelair	94.400		DKP	Wamena	
		2.21.01.02.42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2.9.1.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang direhabilitasi	1 Unit	Unit/60 M	393.000	-	-	-	-	1 unit gedung kantor DKP	500.000	unit gedung kantor DKP	893.000		DKP	Wamena	
		2.21.01.02.41	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	2.9.1.2.03.37	Rehabilitasi Sedang/Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi		Unit/60 M	393.000	90 M2	200.000	1 Unit	-	1 Unit	350.000	1 Unit	350.000	4 unit	1.293.000	DKP	Wamena
	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan (1)	2.21.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	2.9.1.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Peningkatan Disiplin ASN			-	-	-	-	66.000	-	-		66.000			Wamena	

		2.21.01.03.02	Kgtan. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	2.9.1.2.04.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah ASN yang mendapat Seragam Dinas	-		-			30 stel pakaian dinas (keki + putih-hitam)	36.000		-	30 stel pakaian dinas (keki + putih-hitam)	36.000	DKP	Wamena	
		2.21.01.03.05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	2.9.1.2.04.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah ASN Yang mendapat seragam batik Papua dan seragam Olah Raga	-		-			30 Stel baju batik papua dan 30 pasang kaos OR	30.000		-	30 Stel baju batik papua dan 30 pasang kaos OR	30.000	DKP	Wamena	
2				2.9.2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKO NOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				-	-	5.500.000		6.000.000		6.300.000		17.800.000			
				2.9.2.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan				-	-	5.500.000		6.000.000		6.300.000		17.800.000			
		2.21.01.16.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	2.9.2.2.01.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun			-	-	2 Unit	1.500.000	2 Unit	1.600.000	2 Unit	1.700.000	6 Unit	4.800.000	DKP	Kab. Jayawijaya
				2.9.2.2.01.2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun					2 Unit (200 M2)	2.000.000	2 Unit (200 M2)	2.200.000	2 Unit (200 M2)	2.300.000	6 Unit	6.500.000	DKP	Kab. Jayawijaya

				2.9.2.2,01.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Rumah Produksi yang dibangun					1 Unit beserta perlengkapannya	2.000.000	1 Unit beserta perlengkapannya	2.200.000	1 Unit beserta perlengkapannya	2.300.000	3 Unit beserta perlengkapannya	6.500.000	DKP	Kab. Jayawijaya
3				2.9.3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			900.000		500.000		2.363.813		6.375.000		6.375.000		16.513.813		
				2.9.3.2,01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai kebutuhan daerah dlm rangka menstabilkan pasokan dan harga Pangan	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok lainnya sesuai kebutuhan daerah dlm rangka menstabilkan pasokan dan harga pangan		900.000		500.000		2.343.813		6.275.000		6.375.000		16.293.813		
		2.21.2.21.01.16.13	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	2.9.3.2,01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Negera Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM yang disusun	9 Distrik	300.000			1 Dokumen	65.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	300 ton beras premium	565.000	DKP	Wamena

		2.21.2.21.0 1.15.12	Penanganan Pasca Panen dan hasil pertanian	2.9.3.2,01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi pembinaan dan fasilitasi upaya penyediaan bahan pangan lokal				-	-	2 Desa	600.000	2 Desa	700.000	2 Desa	700.000	150 Orang	2.000.000	DKP	Kab. Jayawijaya
				2.9.3.2,01.4	Pemantauan Stock, Pasokan dan harga Pangan	Jumlah laporan stok, pasokan dan harga pangan yg tersusun				-	-	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	3 Dokumen	300.000		
				2.9.3.2,01.5	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah lembaga yg dikem- bangkan dan jumlah doku- men yg disusun						1 Dokumen / 1 lembaga	100.000	1 Dokumen / 1 lembaga	100.000	1 Dokumen / 1 lembaga	100.000	3 Dokumen 1 lembaga	300.000		
				2.9.3.2,01.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Indonesia yang terbentuk				-	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	3 Unit	3.400.000		
		2.21.2.21.0 1.16.03	Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	2.9.3.2,04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan dan Perkapita/ Tahun Harapan (PPH) yang disusun	Jumlah dokumen Skorp Konsumsi Pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH) yang disusun	1 BH	1 BH	100.000	1 bh	75.000	1 bh	28.813	1 bh	75.000	1 bh	75.000	1 bh	353.813	DKP	Wamena

			Penganekaragaman konsumsi pangan	2.9.3.2,04.2	Pemberdayaan masyarakat dalam penga nekaragaman konsumsi pangan berbasis lokal	Jumlah Kampung Stunting yang diberdayakan				-	7 Kampung	450.000	20 Kampung	4.000.000	20 Kampung	4.000.000	27 Kampung	8.450.000		
			Pemanfaatan pekarangan utk pengembangan pangan			Capaian pem binaan kampung ramah anak		Kampung	200.000	10 Kampung	150.000						10 Kampung	350.000		
			Penanganan Pasca Panen dan pengolah an hasil pertanian			Jumlah masyarakat yang di latih		50 Orang	100.000	30 Orang	75.000						30 Orang	175.000		
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan			Jumlah desa yang menda pat pendampingan		2 Desa	200.000	2 Kampung	200.000						2 Kampung	400.000		
					Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal			-		-	20.000		100.000		100.000		220.000		

		2.21.2.21.01.16.21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	2.9.3.2.03.1	Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga minimum pangan lokal	Jumlah dokumen Ketersediaan Informasi , Pemantauan dan analisis harga pangan pokok					1 Kali (1 dokumen)	20.000	3 Kali (1 dokumen)	100.000	3 Kali (1 dokumen)	100.000	3 Kali (3 dokumen)	220.000	DKP	Wamena
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan	2.21.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	2.9.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			-	75.000	100.000	110.000	120.000	405.000						
				2.9.4.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Data Base Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan			-	75.000	100.000	110.000	120.000	405.000						
		2.21.01.16.02	Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	2.9.4.2.01.1	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Data Base Potensi Produk Pangan			1 Dokumen (2 Distrik)	75.000	1 Dokumen (6 Distrik)	100.000	1 Dokumen (6 Distrik)	110.000	1 Dokumen (6 Distrik)	120.000	4 Dokumen	405.000	DKP	Wamena
5				2.9.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Capaian pengawasan keamanan pangan				75.000	2.719.000	300.000	450.000	3.644.000						

				2.9.5.2,01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar.			100.000		75.000		2.719.000		300.000		450.000		3.644.000		
		2.21.01.16.22	Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan	2.9.5.2,01.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Pengawasan Keamanan pangan		-	-		-	3 Orang	69.000	4 Orang	100.000			7 Orang	169.000	DKP	Bogor
						Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Distrik 150 Orang	100.000	50 Pedagang	75.000	3 Kampung (30 orang)	150.000	4 Kampung	200.000	4 Kampung	250.000	11 Kampung	775.000	DKP	Wamena
				2.9.5.2,01.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Komoditas Pangan Segar yg tersertifikasi									5 Komoditas	200.000	5 Komoditas	200.000	DKP	Wamena	
				2.9.5.2,01.5	Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar	Jumlah Laboratorium dan rumah petugas pengawasan mutu dan keamanan pangan yg dibangun			-			2 unit	2.500.000					2 unit	2.500.000	DKP	Wamena
TOTAL									3.511.522		2.284.000		11.410.309		16.605.750		16.276.000		50.087.581		

**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2022**

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah & Program/Keg.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan(Output)		Hasil Kegiatan				
				Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Transparansi & Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur dan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan				
Usuran Pemerintahan Bidang Pangan	Pengembangan potensi ekonomi local yang mendukung pengembangan jasa dan pariwisata infrastuktur berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan	Meningkatnya Perekonomian Pada sector Produktif		Meningkatnya Produktifitas Komoditi Pangan Dalam Rangka Kemandirian pangan		Terjaganya Kestabilisan Ketersediaan Pangan dan Peningkatan Pola Konsumsi Masyarakat/ Rumah Tangga		Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Pola Pangan Harapan				
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %							
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun	Kabupaten Jayawijaya	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasiyang Disusun	100 %							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Jayawijaya	Dokumen Renja dan RKA Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	DAU	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Jayawijaya	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000	DAU
Administrasi Keuangan				Persentase Administrasi Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan	100 %						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Jayawijaya	Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	10.000.000	DAU
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran			Kabupaten Jayawijaya	Laporan keuangan Bulanan/ semesteran yang disusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Bulanan/ Semesteran Keuangan yang disusun	12 Laporan	Tersedianya Laporan Bulanan/ Semesteran Keuangan yang disusun	12 Laporan	12.000.000	DAU
Administrasi Umum				Persentase Administrasi Umum yang Dilayani	100 %						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Jayawijaya	komponen listrik yang disediakan	3 Jenis	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	3 Jenis	Tersedianya Komponen Listrik yang disediakan	3 Jenis	10.000.000	DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Jayawijaya	Logistik Kantor yang disediakan	56 Jenis Bahan Logistik	Jumlah Logistik Kantor yang tersedia	56 Jenis Bahan Logistik	Tersedianya Logistik Kantor	56 Jenis Bahan Logistik Kantor	60.000.000	DAU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Jayawijaya	Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	60.000 Exemplar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	60.000 Exemplar	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60.000 Exemplar	20.000.000	DAU

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Luar Kabupaten Jayawijaya	koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	20 Kali	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang diikuti	20 Kali	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	20 Kali	300.000.000	DAU
Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah			Kabupaten Jayawijaya	Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	125 Kali	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	125 Kali	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	125 Kali	100.000.000	DAU
Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Jayawijaya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	40.000.000	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Jayawijaya	Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	24.000.000	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan			Kabupaten Jayawijaya	Jasa Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	12 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang difasilitasi	11 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4	Terbayarnya Jasa Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	11 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4	15.000.000	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Jayawijaya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	32 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10 Unit Komputer, , 10 Unit Printer, 11 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit Komputer, , 10 Unit Printer, 11 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4	60.000.000	DAU
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Jayawijaya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 Unit	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000	DAU

Pembangunan Infrastruktur Kantor			Kabupaten Jayawijaya	Pembangunan Pengaman / Pembatas Area Kantor	70 M	Jumlah (Panjang) Pagar Pengaman Kantor yang dibangun	70 M	Terbangunnya Pagar Pengaman Kantor	70 M	210.000.000	DAK
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kabupaten Jayawijaya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14 Unit	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 unit Leptop 2 Unit Scaner 6 Unit Printer	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 unit Leptop 2 Unit Scaner 6 Unit Printer	150.000.000	DAU
Sosialisasi : PPH Konsumsi, PPH Ketersediaan, Implementasi Perundang-Undangan, Sinkronisasi Panel Harga Pangan Pokok ,FSVA dan Pengawasan Keamanan Pangan			Jakarta	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	20 Orang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi PPH Konsumsi, PPH Ketersediaan, Implementasi Perundang-Undangan, Sinkronisasi Panel Harga Pangan Pokok ,FSVA dan Pengawasan Keamanan Pangan	20 Orang	Terlaksannya Sosialisasi PPH Konsumsi, PPH Ketersediaan, Implementasi Perundang-Undangan, Sinkronisasi Panel Harga Pangan Pokok ,FSVA dan Pengawasan Keamanan Pangan	20 Orang	450.000.000	DAU
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				Persentase penyediaan insfaktruktur pangan	100 %						
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			Kabupaten Jayawijaya (Piramid, Siepkosi dan Wita Waya)	Infrastruktur Lumbung Pangan	3 Unit	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	3 Unit	Tersedianya Lumbung Pangan	3 Unit	1.200.000.000	DAK

Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur			Kabupaten Jayawijaya (Piramid, Siepkosi dan Wita Waya)	Infrastruktur Lantai Jemur	3 Unit	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	3 Unit	Tersedianya Lantai Jemur	3 Unit	750.000.000	DAK
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			Kabupaten Jayawijaya (Wamena)	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1 Unit	Jumlah Rumah Pelatihan Pengolahan Hasil Pangan Lokal	1 Unit	Terbangunnya 1 Unit Rumah Pelatihan Pengolahan Hasil Pangan Lokal	1 Unit	1.000.000.000	DAK
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66 %						
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			Kabupaten Jayawijaya	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	100.000.000	DBH
Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal			Kabupaten Jayawijaya (Maima ,Usilimo,Bugi dan Biri)	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	4 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Keladi yang dibina	4 Kelompok	Terbinanya Kelompok Tani Keladi	4 Kelompok	600.000.000	Otsus
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan yang diikuti	4 Kali	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan yang diikuti	4 Kali		4 Kali	100.000.000	DBH
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			Kabupaten Jayawijaya (Pasar Jibama, Potikelek, Wouma, Sinakma)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	13 Komoditi	Jumlah Komoditas Pangan yang dipantau	13 Komoditi (Beras Premium, Medium, B. Puti, B.Merah, Kedelai, Cabai Merah	Tersedianya Data Informasi Stok, Pasokan dan Harga Pangan	13 Komoditi (Beras Premium, Medium, B. Puti, B.Merah, Kedelai,	100.000.000	DBH

							Keriting, Cabai Rawit, Gula Pasir, Daging Ayam, Telur, Daging Sapi, Tepung, Minyak Goreng).		Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit, Gula Pasir, Daging Ayam, Telur, Daging Sapi, Tepung, Minyak Goreng).		
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Jayawijaya	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	250.000.000	Otsus
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapit Per tahun			Kabupaten Jayawijaya	Sosialisasi dan Penyusunan Target Konsumsi Pangan Per kapita	1 kegiatan dan Dokumen	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan dan Dokumen yang tersusun	1 kegiatan dan Dokumen	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyusunan Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	1 kegiatan dan Dokumen	100.000.000	DAU
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Kabupaten Jayawija (Musatfak, Wollo, Bugi, Mulia ma dan Wouma)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekeagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 KWT	Jumlah KWT yang diberdayakan	5 KWT	TerbinanyaKelo mpok Wanita Tani	5 KWT	350.000.000	Otsus
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			Kabupaten Jayawijaya(Asolokobal, Siepkosi, H ubikiak, Aso logaima, Lib arek)	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	5 Kelompo k	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	5 Kelompok	Terbentuknya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	5 Kelompo k	250.000.000	Otsus

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Persentase Tingkat capaian indeks ketahanan pangan	70 %						
Penyusunan Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Lokal			Kabupaten Jayawijaya (Wamena ,Wesapu, Kurulu Wouma,As olokobal)	Tersedianya data Base Kerentanan dan Ketahananpangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Potensi Produk Pangan Lokal	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Data Potensi Produk Pangan Lokal	1 Dokumen	200.000.000	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Jayawijaya (Wamena)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5 Kampung 1 Dokumen	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan yang dilaksanakan	5 Kampung 1 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	5 Kampung 1 Dokumen	50.000.000	DBH
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	85 %					175.000.000	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Jayawijaya : (Wamena, Wesaput, Wouma)	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani yang dibina dan diawasi	3 Kelompok	Terbinanya Kelompok Tani	3 Kelompok yaitu: (lalma, Hogoras uok dan Wesakin)	75.000.000	DAU
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Jayawijaya (Wamena, Wesaput, Wouma)	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Prima 3	5 Komoditi (Ubi Jalar Kentang, Wortel, Kol da daun Bawang)	Jumlah Komoditi yang disertifikasi	5 Komoditi (Ubi Jalar Kentang, Wortel, Kol da daun Bawang)	Terlaksananya Sertifikasi Prima 3	5 Komoditi (Ubi Jalar Kentang, Wortel, Kol da daun Bawang)	90.000.000	DBH
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Jayawijaya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah Alat Uji Residu Pestisida dan Bahan Kimia Lainnya serta	1 Kegiatan	Tersedianya Alat Uji Residu Pestisida dan Bahan Kimia	1 Kegiatan	40.000.000	DAU

				Segar Asal Tumbuhan		Uji Sampel Bahan Pangan Segar		Lainnya serta Uji Sampel Bahan Pangan Segar			
										6.381.000.000	

